

**MEMBANGUN KESADARAN MAHASISWA SEBAGAI SOCIAL CONTROL
MELALUI PENDEKATAN RATIONAL EMOTIVE THERAPY (RET)
DALAM MENANGKAL TERJADINYA MONEY POLITIC PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI ACEH**

**Revive Students Awareness as Social Control by the Rational Emotive Therapy
(RET) Approach in Warding off Money Politic in the 2024
General Election in Aceh Province**

Hendri¹, Kurnia Rahmayanti²

^{1,2}Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ubudiyah Indonesia (UII)

*Corresponding Author: hendri@uui.ac.id

Abstrak

Praktik money politik dapat memunculkan dampak yang tidak sehat dalam proses perpolitikan di Indonesia, terutama di provinsi aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menegakkan Syariat Islam. Praktik money politik tidak dibenarkan baik secara hukum positif maupun secara hukum Islam. Namun, faktanya di lapangan masih banyak terjadinya fenomena praktik money politik pada saat pemilu, ironisnya ini juga terjadi di provinsi yang menjunjung nilai-nilai Islam, yaitu provinsi Aceh. Kemudian, mahasiswa juga sudah tidak menyadari lagi akan eksistensi perannya selaku mahasiswa, yang salah satunya adalah sebagai social control dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih parahnya lagi terjadinya kesalahan dalam berpikir dan mempersepsikan praktik money politik sebagai hal yang wajar, dan benar. Didasari atas fenomena tersebut maka dianggap penting dilakukan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan intervensi psikologi melalui Rational Emotive Therapy (RET) untuk menumbuhkan kembali kesadaran mahasiswa sebagai social control dalam mencegah terjadinya praktik money politik pada pemilu tahun 2024 mendatang. Peserta dalam kegiatan pengabmas ini berjumlah 30 orang, yaitu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tujuan dilakukan kegiatan pengabmas ini agar mahasiswa dapat berpikir kembali secara rasional dan dapat mempersepsi secara tepat bahwa praktik money politik adalah hal yang salah. Hasil kegiatan pengabmas ini menunjukkan hal yang positif, di mana terjadinya perubahan pada peserta, baik pada aspek kognitif, afeksi, maupun perilaku. Kemudian, peserta juga sudah menyadari kembali akan perannya sebagai social control dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam mengontrol agar tidak terjadinya praktik money politik pada pemilu tahun 2024 mendatang.

Kata Kunci : Membangun Kesadaran Mahasiswa sebagai Social Control, Rational Emotive Therapy (RET), Money Politic

Abstract

The practice of money politics can have an unhealthy impact on the political process in Indonesia, especially in the province of Aceh as one of the provinces in Indonesia that enforces Islamic Sharia. The practice of money politics is not justified either in positive law or in Islamic law. However, the fact is that on the ground there are still many phenomena of the practice of money politics during elections, ironically this also occurs in a province that upholds Islamic values, namely the province of Aceh. Then, students are also no longer aware of the existence of their role as students, one of which is as social control in social life. What's even worse was the occurrence of errors in thinking and perceiving the practice of money politics as a normal thing, and right. Based on this phenomenon, it was considered important to carry out a community service activity with a psychological intervention approach through Rational Emotive Therapy (RET) to revive students awareness as social control in preventing the practice of money politics in the upcoming 2024 elections. Participants in this community service activity totaled 30 people, namely students from the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Ar-Raniry Banda Aceh. The purpose of this community service activity was so that students can think rationally again and can perceive correctly that the practice of money politics was wrong. The results of this community service activity show positive things, where positive changes occur in participants, both in cognitive, affective, and behavioral aspects. Then, the participants have also become aware again of their role as social control in social life, one of which is in controlling so that the practice of money politics does not occur in the upcoming 2024 elections.

Keywords: Revive Students Awareness as Social Control, Rational Emotive Therapy (RET), Money Politic

1. PENDAHULUAN

Politik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena politik menjadi pengendali dalam pengambilan keputusan suatu negara. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Roger H. Soltou, mengemukakan sebagai berikut: “*the term (politics) is reserved for those common affairs are under the direction of an authority or agency managing or controlling these affairs on behalf of, and in the name of the community. This agency or authority we call the state*”.

Manusia sebagai makhluk sosial dan dinamis menjadi inti dari aktivitas politik itu sendiri, baik sebagai aktor maupun sebagai sasaran dari politik itu sendiri. Psikologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan juga memiliki bagian untuk melakukan kajian atau mengembangkan intervensi dalam bidang politik, yaitu melihat atau menganalisis perilaku, proses berpikir, dan perasaan manusia yang berkaitan dengan politik itu sendiri sehingga dapat dirancang konsep apa yang perlu diterapkan agar perilaku politik yang muncul sesuai dengan apa yang diharapkan. Politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi agar tercapai tujuan politik itu sendiri (Mariam Budiardjo, 1982). Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat sekarang menganut sistem politik demokrasi sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.

Namun, perlu dipahami dan disadari, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (A. Hamid, 1992), dalam hal ini landasan dasar kekuasaan Negara Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan dasar kekuasaan negara tersebut, Indonesia juga memiliki sistem politik yang mengatur hubungan dan fungsi antar elemen dalam tata negara agar dapat mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Artinya, kebebasan dalam sistem politik di Indonesia tetap memiliki kontrol, baik secara lembaga yang dibentuk oleh Negara untuk membantu proses perjalanan politik itu sendiri, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk mulai dari pusat, provinsi

dan tingkat kabupaten kota. Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga demikian, yang dibentuk mulai dari pusat, provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian, ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) yang memiliki peran untuk mengawasi dua lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.

Selain dari kelembagaan resmi yang dibentuk oleh negara, secara normatif masyarakat juga memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan sebagai wujud kontrol sosial (*social control*) teradap terselenggaranya pemilu agar berjalan dengan lancar dan bermartabat, salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Sebagai generasi penerus yang memiliki intelektual, mahasiswa tentunya memiliki peran dan tanggung jawab ideologis sebagai pewaris utama perjuangan bangsa maupun tanggung jawab profesional agar dapat berperan aktif di dalam proses pembangunan bangsa. Dalam perannya, mahasiswa memegang peran yang salah satunya sebagai *social control* tentunya mahasiswa diharapkan memiliki kekuatan baik secara intelektual maupun moral. Salah satu peran mahasiswa sebagai *social control* yang sangat diharapkan adalah peduli terhadap dinamika politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi pelopor edukasi politik yang sehat, menjadi filter bagi masyarakat agar tidak terjebak dengan praktik-praktik politik yang tidak bermoral, salah satunya seperti adanya praktik politik uang (*money politic*).

Sebagaimana yang diketahui, banyak selama ini praktik *money politic* yang terjadi dilakukan oleh oknum calon legislatif sebagai strategi untuk meraih kemenangan. Sayangnya, respon masyarakat terhadap fenomena tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan ada yang membenarkan. Padahal, sebagaimana yang diketahui praktik *money politic* uang suatu hal yang tidak dibenarkan, baik secara hukum negara, agama, maupun secara sosial, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Kemudian, dalam pandangan ajaran Islam praktik *money politic* dianggap perbuatan yang dosa dan tempatnya di neraka. Sebagaimana dalilnya “*Arrosyi Wal Murtasyi Finnari*”. Sebagai provinsi penegak syariat Islam seharusnya provinsi Aceh menjadi *role model* dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Namun kenyataannya masih banyak terjadi pelaksanaan praktik politik

yang harmonis, bermartabat, dan bermoral di provinsi Aceh, lebih ironisnya, hal tersebut terjadi di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan dalam kegiatan “Bincang-bincang Polotik dengan Mahasiswa”, sebagian mahasiswa sangat apatis terhadap politik. Menurut mereka, politik tersebut hanya tempat atau ruangnya orang yang memiliki uang. Kemudian, ada yang menganggap praktik *money politic* yang biasa dilakukan oleh oknum calon legislatif merupakan hal yang wajar dilakukan karena itu dianggap sebagai salah satu strategi politik yang sangat efektif untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Selanjutnya, ada yang menganggap mahasiswa tidak memiliki peran dalam politik praktis karena mahasiswa masih pada tahapan belajar di perguruan tinggi. Kontrol sosial terhadap proses politik itu sendiri hanya tanggung jawab lembaga-lebanga tertentu saja, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak keamanan (TNI-Polri).

Berdasarkan dinamika permasalahan di atas maka dianggap urgen dilakukan satu pendekatan secara psikologis sebagai bentuk edukasi untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa sebagai *social control* dalam proses perpolitikan di provinsi Aceh.

2. METODE

Sebagai sebuah kegiatan akademik tentunya diperlukan sebuah metode yang jelas dan sistematis agar program kegiatan yang dilaksanakan bisa terukur dan tujuannya tercapai. Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Wirartha, 2006) metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Adapun metode pengumpulan data awal dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan *focus group discussion (FGD)*. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan intervensi psikologi untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa sebagai *social control*. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang bertema “Membangun Kesadaran Mahasiswa sebagai Social Control melalui Pendekatan Rational Emotif Terapy (RET) dalam Menangkal terjadinya Money Politic pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Aceh”.

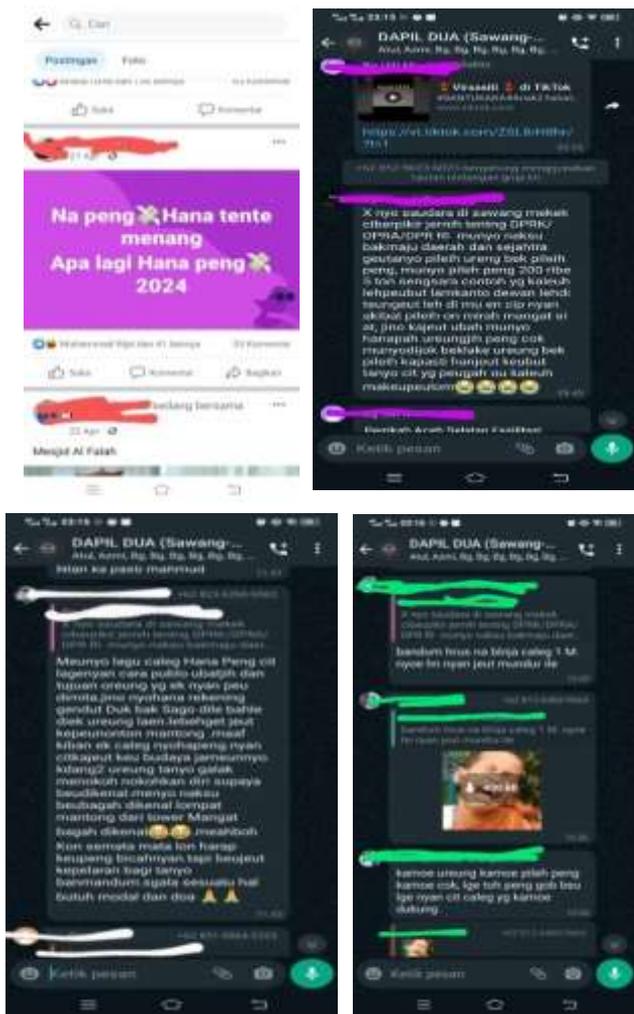
Kegiatan pengabmas ini berlangsung selama satu minggu, sejak tanggal 7 sampai dengan 14 Februari 2023 bertempat di Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 1. Tahapan-Tahapan Kegiatan

No.	Kegiatan	
1.	Asesmen Awal	Observasi
2.	Sasaran	Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh berjumlah 30 orang.
3.	Asesmen Lanjutan	Wawancara
4.	Intervensi	Rational Emotive Therapy (RET)
5.	Hasil	Wawancara
		FGD
6.	Analisis	Deskriptif Kualitatif
7.	Pelaporan	Artikel Pengabmas

a. Asesmen Awal

Asesmen awal dilakukan melalui kegiatan observasi. Observasi dilakukan terhadap perilaku masyarakat Aceh dalam bentuk statemen-statement baik secara langsung maupun di media sosial (Group WA dan Facebook) yang berhubungan dengan aktivitas perpolitikan pasca munculnya Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg baik tingkat DPRK, DPRA, maupun DPR-RI di provinsi Aceh. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak netizen berkomentar seolah praktik politik uang merupakan hal yang seharusnya terjadi pada saat pemilihan anggota legislatif. Kemudian, disaat ada yang berkomentar mengajak untuk memilih caleg yang punya potensi yang baik, berdidikasi, punya gagasan walaupun tidak punya uang malah direspon negatif dan dibuli. Berikut beberapa cuplikan hasil observasi di sosmed :



Gambar 1. Cuplikan hasil observasi di Sosmed

a. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabmas ini berjumlah 30 orang dengan ketentuan laki-laki 15 dan perempuan orang.

b. Asesmen Lanjutan (wawancara)

Hasil wawancara awal yang dilakukan kepada mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini seperti yang digambarkan dalam latar belakang di atas, menurut mereka, politik tersebut hanya tempat atau ruangnya orang yang memiliki uang. Kemudian, ada yang menganggap praktik *money politic* yang biasa dilakukan oleh oknum calon legislatif merupakan hal yang wajar dilakukan karena itu dianggap sebagai salah satu strategi politik yang sangat efektif untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Selanjutnya, ada yang menganggap mahasiswa tidak memiliki peran

dalam politik praktis karena mahasiswa masih pada tahapan belajar di perguruan tinggi. Kontrol sosial terhadap proses politik itu sendiri hanya tanggung jawab lembaga-lembaga tertentu saja, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak keamanan (TNI-Polri).

c. Intervensi

Adapun bentuk intervensi psikologis yang tepat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa sebagai *social control* dalam Menangkal terjadinya *Money Politic* pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Aceh yaitu dengan pendekatan *Rational Emotif Therapy (RET)* melalui ceramah, seminar, dan pemberian tugas (*role play*). RET pertama kali dikembangkan oleh Alberl Ellis pada tahun 1960 di Amerika (Amirah Diniaty, 2009). Menurut Gerald Corey (2009), berpikir irasional ini diawali dengan belajar secara tidak logis yang biasanya diperoleh dari orang tua dan budaya tempat disebarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan kata-kata yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Masih menurut Gerald Corey, RET berasumsi bahwa keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai irasional orang-orang berhubungan secara kausal dengan gangguan-gangguan emosional dan behavioral-nya, maka cara yang paling efisien untuk membantu orang-orang untuk membuat perubahan-perubahan kepribadiannya adalah mengonfrontasikan mereka secara langsung dengan filsafat hidup mereka sendiri, mengajari mereka bagaimana berfikir secara logis, dan karenanya mendorong mereka untuk mampu mengubah dan menghapus keyakinan cara berpikir irasionalnya.

RET banyak kesamaan dengan dengan terapi yang berorientasi pada kognisi, perilaku dan perbuatan dimana RET menekankan pada berpikir, memikirkan, mengambil keputusan, menganalisis dan berbuat. Singgih Gunarsa (2000), mengungkap bahwa Terapi Rasional Emotif adalah berusaha memperbaiki melalui pola berpikir dan menghilangkan pola berpikir yang irasional. Konselor berperan sebagai usaha untuk mendidik kembali. Jadi, konselor bertindak sebagai pendidik mengajarkan secara langsung baik secara metode ceramah, seminar,

konseling individual atau kelompok dengan memberikan tugas yang harus dilakukan oleh klien serta mengajarkan strategi tertentu untuk memperkuat proses berpikirnya. Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertindak laku rasional manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertindak laku irasional individu itu menjadi tidak efektif (Amirah Diniaty, 2009).

Jadi, agar mahasiswa dapat menumbuhkan kesadarannya kembali akan eksistensinya yang berperan sebagai *social control* maka terlebih dahulu perlu dirubah cara berpikir irasional mereka yang menganggap praktik *money politic* yang biasa dilakukan oleh oknum calon legislatif merupakan hal yang wajar karena dianggap sebagai salah satu strategi politik yang sangat efektif untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Selanjutnya, ada yang menganggap mahasiswa tidak memiliki peranan sebagai *social control* dalam politik praktis karena mahasiswa masih pada tahapan belajar di perguruan tinggi.

Tahapan-tahapan intervensi RET yang dilakukan kegiatan ini :

1. Seminar

Seminar adalah salah satu strategi edukasi dengan menyampaikan pesan edukasi secara langsung kepada peserta (mahasiswa). Dalam kegiatan ini pesan edukasi yang disampaikan adalah :

a. Pandangan Psikologi terhadap Perilaku Money Politic.

Secara psikologis praktik *money politic* merupakan salah satu bentuk dari gangguan kepribadian (*disorder personality*). Kenapa demikian, karena memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Menurut Katarina Suko Tri Palupi Hapsasi (2020), mendefinisikan gangguan kepribadian adalah kondisi ketika seseorang memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Orang yang cenderung menggunakan *money politic* sebagai strategi mendapatkan suara dari masyarakat untuk dipilih menggambarkan tidak memiliki kapasitas, gagasan, kreativitas, atau sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat secara jelas dan rasional. Sebenarnya, individu seperti ini tidak tepat direkomendasikan untuk dipilih menjadi wakil rakyat (DPR).

Kemudian, sudah pasti saat terpilih individu seperti ini tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat karena dia harus berfokus untuk mengembalikan modal politik terlebih dahulu. Kemudian, individu seperti ini juga menggambarkan perilaku yang

tidak sehat, yaitu tidak berani berkompetisi secara sehat untuk mendapat simpatisan masyarakat.



Gambar 2. Seminar Edukasi Politik

b. Money Politic dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam

Hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang Republik Indonesia, yang tercantum dalam undang-undang no. 8 tahun 2008. yang dimaksud *money politic* adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung. Tuntutannya, agar pemilih menggunakan hak pilihnya kepada si pemberi imbalan/uang sesuai. Hal ini tercantum dalam pasal 87 UU Nomor 10 Tahun 2008. Sedangkan hukum Islam memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at, dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori risywah.

c. Dampak yang ditimbulkan dari praktik Money Politic (secara psikologis dan sosial)

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik *money politic*, pertama secara psikologis, yaitu akan membuat masyarakat merasa tidak berdaya terhadap wakil yang dipilihnya karena merasa suara yang diberikan sebagai bentuk transaksi jual beli. Jadi, ketika anggota DPR yang dipilih tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat atau tidak menunjukkan kinerja sebagai wakil rakyat masyarakat merasa tidak berdaya untuk memprotes atau mengkritik anggota DPR tersebut (*powerless society*). Kemudian, akan menimbulkan suasana politik yang tidak bermartabat dan tidak bermoral. Akan menjadi tekanan bagi individu-individu yang memiliki kapasitas/sumber daya manusia (SDM) namun tidak memiliki financial sehingga menggurungkan niatnya atau merasa minder untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR (*restrained human resource*).

Kedua, secara sosial akan menimbulkan benturan-benturan dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana, antara pendukung caleg A dengan pendukung caleg-caleg lainnya terjadi saleng mengejek, menjatuhkan, dan akan memancing suasana yang tidak kondusif dan sportif sehingga akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

2. Pemberian Tugas (Role Play)

Adapun bentuk tugas yang diberikan adalah memaikan peran mahasiswa sebagai *social control* dalam kehidupan nyata di lingkungan sekitar tempat tinggal. Bentuk kegiatannya meliputi :

a. Memberi edukasi politik bebas money politic kepada masyarakat

Aktivitas ini dilakukan oleh mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabmas ini, yaitu di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 3. Edukasi politik bebas money politic kepada masyarakat Desa Blang Krueng

b. Mensosialisasikan edukasi politik bebas money politic kepada masyarakat

Kegiatan ini dilakukan melalui pembuatan poster-poster atau spanduk yang ditempel di tempat tertentu dan media sosial sehingga masyarakat bisa membaca dan ini menjadi salah satu sumber edukasi politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan (observasi) yang dilakukan terhadap para mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabmas ini menunjukkan bahwa para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka

mengikuti dengan serius dan aktif menanyakan apa yang belum dipahami mengenai materi yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada umumnya para peserta sangat membutuhkan kegiatan dengan tema seperti ini. Para peserta mengakui mendapat pengetahuan baru mengenai dunia perpolitikan dalam perspektif psikologi. Setelah mendapatkan materi akhirnya mereka menyadari selama ini salah mempersepsikan praktik *money politic*. Mereka juga menyadari selama ini sangat apatis kepeduliannya dalam masalah politik. Mereka juga mengakui banyak ditemukan di lapangan praktik-praktik politik yang salah, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Dengan sekilas bekal pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan pengabmas ini, para peserta akhirnya menyadari kembali akan eksistensi perannya mereka selaku mahasiswa sebagai *social control* dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam mengedukasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya praktik *money politic*.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pada umumnya para peserta kegiatan sangat puas dan senang mengikuti kegiatan pengabmas dengan tema “Membangun Kesadaran Mahasiswa sebagai Social Control melalui Pendekatan *Rational Emotif Terapy (RET)* dalam Menangkal terjadinya Money Politic pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Aceh“. Karena berkat kegiatan ini mereka bisa mengetahui dan menyadri kembali akan peran mereka sebagai *social control* dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah sesi penyampaian materi dilakukan para peserta diminta untuk membuat program perencanaan kelompok untuk mensosialisasikan edukasi politik bebas *money politic* kepada masyarakat di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sebagai bentuk melaksanakan tugas (Role Play) sebagai agen *social control*. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta mampu merumuskan program kegiatan yang akan dilakukan, yang meliputi kegiaiatan sosialisasi kepada masyarakat, membuat dan poster-poster menolak praktik *money politic*. Hal ini menunjukkan bahwa secara pengetahuan para peserta yang sebelumnya irasional cara berpikir mereka tentang *money politic* akhirnya dengan dilakukannya kegiatan pengabmas ini peserta bisa menyadarai kesalahan cara berpikir mereka tersebut. Kemudian, mereka juga bisa memiliki ketrampilan dalam menyusun program kegiatan yang positif sebagai upaya preventif kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam

kegiatan praktik *money politic* di pelimu tahun 2024 nanti. Selain bermanfaat buat diri sendiri, para peserta juga diharapkan bisa menjadi pelopor bagi masyarakat umum, apalagi mereka berstatus sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai *social control*.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabmas ini dilakukan didasari atas adanya fenomena yang sangat meresahkan terjadi dikalangan masyarakat, fenomena yang berhubungan dengan masalah politik praktis, yaitu praktik *money politic*. Kemudian, muncul sikap apatis dan berpikir secara irasional atau kesalahan dalam mempersepsi praktik *money politic* dari kalangan terpelajar, yaitu mahasiswa yang seharusnya menjadi garda depan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi untuk menolak terjadinya praktik *money politic* dan menjadi *social control* dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pandangan psikologi, Oleh karena itu, dianggap urgen dilakukan sebuah intervensi dengan pendekatan psikologi melalui *Rational Emotive Therapy (RET)* untuk menumbuhkan kembali kesadaran mahasiswa sebagai *social control* dalam mencegah terjadinya praktik *money politic* di pilkada tahun 2014 mendatang. Tujuan dilakukan intervensi ini untuk mengubah cara berpikir mahasiswa dari yang berpikir irasional dan terjadinya kesalahan dalam mempersepsi praktik *money politic* agar bisa berpikir secara rasional dan mempersepsi secara tepat terhadap praktik *money politic* bahwa itu adalah hal yang salah.

Dengan dilakukan kegiatan pengabmas ini dalam waktu lebih kurang selama 1 minggu dengan intervensi psikologi melalui pendekatan RET menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada para peserta, baik pada aspek kognitif, emosi, maupun perilaku. Pada aspek kognitif terjadinya perubahan cara berpikir, di mana sebelumnya mereka berpikir dan mempersepsikan praktik *money politic* adalah hal yang wajar-wajar saja, seharusnya memang terjadi, dan akhirnya sudah berubah. Setelah mengikuti kegiatan pengabmas ini peserta sudah menyadari selama ini sangat apatis kepeduliannya terhadap masalah politik. Mereka juga mengaku banyak ditemukan di lapangan praktik-praktik politik yang salah, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Secara emosional, peserta sangat senang dengan adanya kegiatan pengabmas seperti ini dan merasa khawatir dengan fenomena politik yang terjadi selama ini yang mempraktikkan perpolitikan

yang tidak mendidik, tidak bermartabat, dan tidak bermoral. Mereka juga sangat khawatir apabila nanti para DPR yang terpilih banyak di antara mereka yang menggunakan praktik *money politic*. Dengan adanya kegiatan pengabmas ini, peserta menyadri kembali akan peran mereka sebagai *social control* dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, secara perilaku juga terlihat adanya perubahan yang terjadi pada peserta, di antaranya mampu membuat program perencanaan kelompok untuk mensosialisasikan edukasi politik bebas *money politic* kepada masyarakat di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Kemudian, mereka juga bisa memiliki ketrampilan dalam menyusun program kegiatan yang positif sebagai upaya preventif kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik *money politic* di pelimu tahun 2024 nanti.

5. REFERENSI

- A Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori perundang-undangan Indonesia", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Amirah Diniaty. (2009). Teori-teori Konseling. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Budiardjo, M. 1982. Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: PT Gramedia.
- Corey, Gerald. (2013) .Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi. Terjemah E. Koswara. Bandung. Refika Aditama
- Gunarsa, Singgih D. 2004. Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga,. Cetakan. 7. Jakarta : PT. Gunung Mulia.
- Wirartha, I. M. (2006). *Pedoman Penulian Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Katarina Suko Tri Palupi Hapsasi (2020), Personality Disorder. Diakses melalui situs <https://rsjdahm.kaltimprov.go.id/author/syahrifah/> 2023